

---

## **SISTEM INFORMASI, KEUANGAN, AUDITING DAN PERPAJAKAN**

<http://jurnal.usbykp.ac.id/index.php/sikap>

---

### **PENGARUH *GOOD GOVERNANCE* DAN LATAR BELAKANG PROFESI KEPALA DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH**

**Mochammad Faishal Agung**

*Fakultas Ekonomi, Universitas Padjadjaran, Indonesia*

**Sri Mulyani**

*Fakultas Ekonomi, Universitas Padjadjaran, Indonesia*

[s.mulyani@unpad.ac.id](mailto:s.mulyani@unpad.ac.id)

---

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh good governance dan latar belakang profesi kepala daerah terhadap kualitas laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah. Variabel independen terdiri dari good governance dan latar belakang profesi kepala daerah, dan variabel dependen yang terdiri dari kualitas laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 6 Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan uji hipotesis menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui kuesioner dan data sekunder berupa laporan. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa good governance memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, tetapi tidak signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Untuk latar belakang profesi kepala daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan maupun kinerja pemerintah daerah. Sedangkan untuk uji simultan good governance dan latar belakang profesi kepala daerah tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah..

**Kata Kunci: Good Governance; Latar Belakang Kepala Daerah; Kualitas Laporan Keuangan; Kinerja Pemerintah Daerah**

---

#### ***Abstract***

*This study aims to determine the effect of good governance and professional background of regional heads on the quality of financial reports and local government performance. The independent variable consists of good governance and professional background of the head of the region, and the dependent variable consists of the quality of financial statements and the performance of local governments. The sample used in this study is 6 regencies / cities in West Java Province in 2018. This research is a quantitative study with hypothesis testing using multiple linear regression analysis methods. The data used in this study are primary data obtained through questionnaires and secondary data in the form of reports. The results in this study indicate that good governance has a positive and significant effect on the quality of financial statements, but not significantly on the performance of local governments. For the professional background of the regional head does not have a significant influence on the quality of financial reports and the performance of local governments. As for the simultaneous test of good governance and professional background of the regional head does not have an influence on the quality of financial reports and local government performance ..*

**Keywords: Good governance; Regional Head Background; Quality of Financial Statements; Local Government Performance**

---

## PENDAHULUAN

Dengan adanya era baru dalam otonomi daerah, yaitu otonomi daerah, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2002, membuat kebijakan yang dipandang demokratis dan menjangkau dalam aspek desentralisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Adanya otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan pemerataan, prinsip demokrasi, keistimewaan dan kekhususan, keadilan serta potensi keanekaragaman daerah dalam sisten Negara Kesatuan Republik Indonesia (Nurdiawan, 2006). Seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai pemerintah daerah, lalu diganti dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, dimana seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia diberikan otonomi yang luas oleh pemerintah pusat untuk membantu pengembangan masing-masing daerah termasuk dalam bidang keuangan. Dan terbitnya otonomi daerah dikarenakan pada asumsi yang mengenai urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah nya sendiri adalah hal yang tepat, sehingga setiap daerah mampu dan mandiri dalam memberikan pelayanan demi tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah.

Adanya UU Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah memperkuat demokrasi pada pelaksanaan otonomi daerah. Dimulai dari tahun 2005, masyarakat memiliki hak untuk memilih Kepala Daerah nya secara langsung dengan melewati Pemilihan Kepala Daerah atau yang sering disebut dengan Pilkada. Dengan begitu dapat memberikan kesempatan bagi semua calon Kepala Daerah dari latar belakang yang berbeda untuk memiliki hak dalam mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah. Dan sejak tahun 2005 itu juga Kepala Daerah yang telah terpilih mempunyai berbagai jenis latar belakang, diantaranya yaitu pengusaha, profesi, politisi, militer, dan sebagainya.

*Good Governance* adalah hal yang menjadi sorotan masyarakat atas organisasi pemerintahan dalam melakukan tata kelola keuangan negara agar terciptanya kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan bersih. Pemerintahan mempunyai tujuan dalam menjalankan tugasnya untuk merencanakan atau membangun daerah agar tercapainya suatu bentuk keberhasilan. Dalam mencapai tujuan tersebut pemerintah daerah wajib untuk melakukan pengelolaan terutama keuangan, dan sumber daya yang ada di daerahnya sendiri. (Azlim, Darwanis dan Usman, 2012). Namun, terdapat dampak dari penerapan kebijakan otonomi daerah yaitu desentralisasi korupsi. Tindakan ini tidak hanya terjadi di pusat, tetapi juga menjalar hingga ke daerah. Dengan modus yang dilakukan seperti kasus suap menyuap, *mark up* belanja, hingga jual beli jabatan. Sehingga berpengaruh juga kepada *Good Governance* yang masih belum sesuai harapan dengan apa yang ada dalam ekspektasi oleh masyarakat.

Meski memiliki pemahaman yang berbeda tentang *good governance*, sebagian besar masyarakat mengharapkan bahwa dengan terciptanya penerapan *good governance* mereka akan dapat memiliki kualitas pemerintahan yang lebih baik. Mereka juga mengharapkan dengan mempunyai praktik *good governance*, pemerintah akan menjadi semakin peduli dengan kepentingan warga nya dan juga dengan harapan angka korupsi akan semakin rendah (Dwiyanto,2005). Dikarenakan masih banyak terjadinya *fraud* atau kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran. Dengan terjadinya hal tersebut masyarakat mulai memperhatikan akan adanya masalah tata kelola yang dihadapi oleh pemerintah daerah, sebab berhubungan dengan bagaimana pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada warga daerah nya. Sehingga harapan dalam penerapan *good governance* hanya menjadi khayalan belaka. Pemerintah pusat maupun daerah harus melakukan pembenahan dan menanggapi secara serius.

Seperti fenomena pemerintah daerah Kota Dumai, dikutip oleh persiapan pers BPK RI perwakilan provinsi Riau. BPK RI telah memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) kepada laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) kota Dumai. Berdasarkan hasil dari pemeriksaan BPK RI bahwa aset tetap, aset lain-lain, dan belanja modal dokumen kota Dumai belum didukung oleh dokumen yang memadai dalam memperoleh keyakinan atas aset tetap dan aset lainnya. Kemudian BPK mengatakan bahwa sistem pengendalian intern kota Dumai tidak

dapat diyakini kewajarannya. Kemudian pada tahun 2014 serapan anggaran kota Dumai belum maksimal, hal tersebut bisa jadi disebabkan oleh sumber daya manusia sebagai pengelola keuangan masih belum bekerja secara maksimal. Sumber : <http://pekanbaru.bpk.go.id/?p=17458>.

Begitu juga dengan berita yang dimuat dalam berita online Kompas.com, terdapat beberapa kepala daerah terlibat kasus korupsi diantaranya yaitu Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar yang tertangkap KPK di rumah dinas karena diduga meminta, menerima, atau memotong Dana Alokasi Umum (DAK) pendidikan Kabupaten Cianjur sekitar 14,5% dari total Rp46,8 miliar. Kemudian Bupati Bekasi, Neneng Hassanah bersama empat pejabat dinas yang menjadi tersangka karena telah dijanjikan menerima suap sekitar Rp13 miliar dari pengembang Lippo Grup, kasus suap tersebut diduga terkait proses perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Lalu dilanjut dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra yang menjadi tersangka karena diduga telah menerima janji mutasi jabatan, proyek, dan perizinan di Kabupaten Cirebon. Bupati Cirebon diduga menerima *fee* dengan nilai total Rp6,425 miliar.

Laporan keuangan dibuat untuk menyajikan informasi yang relevan, andal, dapat dipercaya dan juga mudah dipahami oleh penggunaannya. Laporan keuangan menjadi dasar dalam melakukan *decision making* atau pengambilan keputusan, sehingga kualitas laporan keuangan pasti akan mempengaruhi keputusan yang diambil oleh penggunaannya. Sofian mengatakan bahwa ada tiga poin yang dapat membantu untuk mencapai *good governance* yaitu dari pemerintah, masyarakat sipil, dan dunia usaha. *Good governance* dapat diwujudkan apabila antara ketiga pilar yaitu otoritas politik, ekonomi, dan administrasi dapat diterapkan dengan baik. Akan tetapi harus ada ketentuan agar interaksi tersebut dapat diwujudkan, yaitu dengan memiliki transparansi, partisipasi, kepercayaan politik, dan regulasi yang sehat. Kemudian upaya dalam mencapai kepercayaan publik yaitu dengan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas yang ada didalam laporan keuangan pemerintah, karena laporan keuangan adalah komponen yang penting dalam transparansi pengelolaan keuangan pemerintah.

Dalam PP Nomor 8 Tahun 2006, kinerja pemerintah dapat didefinisikan sebagai hasil dan kegiatan dan program pemerintah yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Kinerja pemerintah tidak bisa disimpulkan hanya dari bagian sisi *input* dan *output* saja, namun harus memperhatikan bagaimana *outcome*, manfaat, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat pemerintah daerah tersebut (Nordian, 2010). Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah : (1) Pengaruh *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah; (2) Pengaruh latar belakang profesi kepala daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah; (3) Pengaruh *good governance* terhadap kinerja Pemerintah Daerah; (4) Pengaruh latar belakang profesi kepala daerah terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

## TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### *Teori Agensi*

Gudono (2014) mengemukakan bahwa teori keagenan dibuat dalam tujuan untuk memahami dan memecahkan masalah yang muncul pada saat adanya ketidaklengkapan atas informasi pada saat melakukan kontrak antara principal (pemberi kerja) dengan agen (penerima pemerintah). Teori keagenan menjelaskan jika agen memiliki keunggulan informasi dibandingkan principal dimana hal tersebut menunjukkan adanya situasi ketimpangan informasi (*information asymmetry*) serta kepentingan agen dan principal berbeda maka akan menimbulkan *principal-agent problem*. Dengan adanya *principal-agent problem* maka akan membuat agen melakukan tindakan yang menguntungkan bagi dirinya dan dapat merugikan prinsipal. Jika dipandang dari sudut pandangan teori keagenan, hubungan antara pemerintah dengan masyarakat

adalah seperti hubungan antara principal dan agen, dimana masyarakat adalah principal dan pemerintah adalah agen. Principal memberikan wewenang pengaturan kepada agen, dan memberikan wewenang pengelolaan sumber daya kepada agen (Prasetyaningsih, 2014).

Semenjak diterapkan sistem otonomi daerah, setiap daerah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangga nya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dan rakyatnya dalam kerangka kesatuan Republik Indonesia. Pada pemerintah daerah, terdapat pemisahan yang tegas antara pemerintah daerah (eksekutif) dengan fungsi perwakilan rakyat (legislatif). Berdasarkan perbedaan fungsi tersebut, eksekutif melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas anggaran daerah yang merupakan manifestasi dari pelayanan publik. Sedangkan legislatif yang merupakan perwakilan masyarakat berperan aktif dalam melaksanakan legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Eksekutif yang bertindak sebagai agen dengan masyarakat yang berperan sebagai prinsipal dalam teori agensi berpendapat bahwa akan terjadi asimetri informasi karena pemerintah memiliki lebih banyak informasi mengenai sumber daya yang dimiliki daerah dalam bentuk APBN/APBD dibandingkan dengan masyarakat (Nurdin,2014). Adanya asimetri informasi dapat menyebabkan konflik antara kedua belah pihak. Adanya *discretionary power* di salah satu pihak akan menimbulkan pelanggaran atas kontrak keagenan, seperti terjadinya perilaku korupsi.

*Agency problem* yang terjadi di antara pemerintah dengan masyarakat dapat diminimalisir dengan pencapaian kinerja yang baik oleh pemerintah. Masyarakat sebagai prinsipal dapat melihat dan mengukur bagaimana hasil kinerja pemerintah daerah. Pemerintah harus dapat mengelola dan mengukur kinerjanya dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja yang benar dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan mendapatkan dukungan masyarakat (Nurdin, 2014).

### **Good Governance**

Menurut *World Bank* pengertian dari *good governance* yaitu penyelenggaraan manajemen dalam pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sepaham dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran terhadap kemungkinan adanya kesalahan alokasi atas dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik ataupun administrative, serta menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Kemudian menurut *United Nation Development Program (UNDP)* mendefinisikan *governance* adalah pelaksanaan kewenangan atau kekuasaan di bidang ekonomi, politik, dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrument kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan, integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat. Dalam pengertian tersebut, *World Bank* lebih memusatkan bagaimana cara pemerintah mengatur sistem manajemen dalam mengelola sumber daya dan ekonomi agar dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Sedangkan UNPD menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara dimana *political governance* mengarahkan dalam proses pembuat kebijakan, *economic governance* yang memperhatikan pada proses pembuatan kebijakan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat dan keadilan, dan *administrative governance* yang dimana berfokus pada implementasi kebijakan.

### **Prinsip Good Governance**

Berikut adalah prinsip-prinsip yang diterapkan dalam *good governance* menurut *world bank* yaitu:

#### **1. Participation**

Masyarakat turut dapat memiliki hak suara untuk pengambilan keputusan dengan langsung atau dengan cara melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah. Partisipasi masyarakat dibangun dengan maksud untuk setiap kebijakan yang dibuat mencerminkan aspirasi dan masyarakat, maka dari itu masyarakat diberi kebebasan berkumpul dan memberikan

pendapatan serta berpartisipasi secara konstruktif. Dalam hal ini masyarakat memiliki hak dalam menyalurkan aspirasinya dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan. Peran serta kontribusi masyarakat dalam proses pembangunan adalah suatu bagian dalam mewujudkan tujuan dari pembangunan itu sendiri yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

## 2. *Fairness*

Adanya kerangka hukum harus diberlakukan secara adil dan tanpa memandang siapapun, termasuk juga di dalamnya hukum-hukum yang terkait dengan hak asasi manusia. Hal ini merupakan prasyarat bagi tegaknya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, tentunya dalam menegakkan aturan hukum yang telah dibuat. Adanya perangkat hukum yang sudah dimiliki wajib untuk dijadikan acuan dalam upaya mewujudkan tujuan bernegara dan bermasyarakat, karena hukum dibuat oleh lembaga yang mewakili masyarakat dan dipilih melewati pemilu.

## 3. *Accountability*

Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka. Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga berkepentingan. Instrument dasar akuntabilitas adalah peraturan perundang-undangan yang ada, dengan komitmen politik akan akuntabilitas maupun mekanisme pertanggung jawaban, sedangkan instrument-instrumen pendukungnya adalah pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara pemerintahan dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.

## 4. *Transparancy*

Transparansi dibuat berdasarkan kebebasan dan keterbukaan segala informasi. Pihak yang berkepentingan dan pihak yang membutuhkan dapat mengakses seluruh lembaga-lembaga, proses pemerintahan, dan informasi. Informasi yang disediakan haruslah memadai dan jelas agar dapat memudahkan pihak pengguna dalam memahami. Dengan adanya transparansi yang dibuat diharapkan dapat mewujudkan kepercayaan publik terhadap para penyelenggara pemerintahan Negara. Dengan begitu tidak akan terjadi kecurigaan antara pihak masyarakat dengan pemerintah.

## 5. *Effectiveness*

Pada prinsip ini mengacu pada parameter untuk menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. Agar pemerintah dapat efisien maka para pejabat pemerintahan wajib mampu untuk menyusun perencanaan-perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian disusun secara terstruktur dan terukur.

## 6. *Efficiency*

Dengan tercapainya pemerintah yang efektif maka partisipasi atas masyarakat dapat dilaksanakan dengan mudah karena program-program yang direncanakan dapat terstruktur sehingga dari proses tersebut dapat membuahkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat digunakan secara efektif dan efisien.

Hubungan antara good governance dengan kualitas laporan keuangan dan kinerja Zeyn (2011) menjelaskan bahwa penerapan *good governance* di Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas. Keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini didukung oleh Kesuma et al (2017) yang menemukan bahwa di penerapan *good governance* berpengaruh tidak signifikan terhadap laporan keuangan kementerian pariwisata. Sementara Saraswati dan Budiarsih (2019) menjelaskan bahwa penerapan *good governance* dan kompetensi pegawai di Kota Denpasar berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini didukung oleh Mursidah dan Khairina (2018), bahwa penerapan *good governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil-hasil penelitian di atas, dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>1</sub> : *Good Governance* Berpengaruh Positif Dan Siginifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Sementara itu Uar (2016) menjelaskan bahwa penerapan *good governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja pelayan public. Widjajanti dan Sugiyanto (2015) mendukung hasil penelitian ini, dan menyatakan bahwa penerapan *good governance* dapat menciptakan *excellent service*. Berdasarkan pada hasil penelitian tersebut, maka dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis :

H<sub>2</sub> : *Good governance* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

### **Upper Echelon Theory**

Hambrick dan Mason, 1984 (dikutip dari Manner, 2010) menjelaskan bahwa kerangka kerja teoritis yang dipengaruhi karya-karya sebelumnya yang berasal dari berbagai disiplin ilmu yang mempelajari karakteristik seorang pimpinan dalam suatu organisasi. Dalam *Upper Echelon Theory* ini dijelaskan bahwa “Kinerja organisasi maupun pilihan strategi organisasi dipandang sebagai refleksi atau cerminan dari karakteristik latar belakang *top management*”. Hambrick dan Mason berpendapat bahwa nilai-nilai individu berjalan sebagai filter disaat menganalisis dan menafsirkan situasi yang kompleks sehingga dapat mempengaruhi pilihan strategi atau keputusan yang akan dipilih. Kemudian mereka berpendapat bahwa karakteristik pemimpin dapat digunakan sebagai indikator filter kognitif dan nilai individu seorang pimpinan eksekutif dalam *decision making*, misalnya seperti pengalaman bekerja atau karier, pendidikan, latar belakang, dsb. Sehingga mereka dapat memberikan kesimpulan bahwa karakteristik seorang pimpinan eksekutif dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang mereka ambil dan strategi yang telah disusun. Berdasarkan teori ini maka hiotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

H3 : Latar belakang profesi kepala daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H4 : Latar belakang profesi kepala daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

### **Karakteristik Kualitas Laporan Keuangan**

Karakteristik laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran normatif yang dapat diwujudkan dalam informasi akuntansi agar dapat memenuhi tujuannya. Demi memenuhi kualitas yang diinginkan, laporan keuangan pemerintah perlu memenuhi empat karakteristik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010:

#### 1. Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan jika informasi yang terdapat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dalam memprediksi di masa yang akan datang, dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Dengan begitu informasi dikatakan relevan ketika informasi tersebut disajikan pada waktu yang tepat dan lengkap.

#### 2. Andal

Agar dapat bermanfaat, informasi juga harus bersifat andal. Dimana informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dapat diverifikasi, dan menyajikan fakta dengan jujur.

#### 3. Dapat dibandingkan

Informasi yang berisi di dalam laporan keuangan akan berguna ketika laporan keuangan tersebut dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya, atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Akan tetapi perbandingan dapat dilakukan ketika entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama setiap tahunnya.

#### 4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh *user* atau pengguna dan juga dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

#### **Opini Audit**

Dalam IHPS BPK, tentang jenis opini terdapat 5 (lima) jenis opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:

##### 1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Menyatakan bahwa laporan keuangan yang diperiksa, telah disajikan dengan wajar terhadap semua hal yang material sesuai dengan standar prinsip akuntansi yang berlaku.

##### 2. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (*Unqualified Opinion with Explanatory Language*). Pendapat diberikan apabila audit telah dilakukan sesuai dengan standar *auditing* yang berlaku, kemudian penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi, namun dalam pendapat ini memiliki keadaan dimana pendapat ini diperlukan bahasa penjelas. Bahasa penjelas yang dimaksud antara lain:

- a. Pendapat auditor didasarkan atas laporan auditor independen lain. Dimana auditor wajib menjelaskan hal ini dalam paragraph pengantar untuk menegaskan pemisahan tanggung jawab dalam pelaksanaan audit.
- b. Laporan keuangan yang dipengaruhi oleh ketidakpastian yang material.
- c. Auditor menemukan adanya perubahan material dalam penggunaan prinsip dan metode akuntansi.

##### 3. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

Pendapat yang menyatakan laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

##### 4. Pendapat Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)

Pendapat yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

##### 5. Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer*)

Pernyataan bahwa auditor tidak memberikan pendapat atas laporan keuangan.

#### **Kinerja Pemerintah**

Kinerja pemerintah dapat diukur dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator yang banyak digunakan dengan tujuan melihat bagaimana kinerja dalam program pembangunan secara menyeluruh di suatu wilayah. IPM merupakan gambaran dari hasil dari program pembangunan yang telah dilakukan beberapa tahun sebelumnya. Begitu juga dengan kemajuan program pembangunan dalam suatu periode dapat diukur dan ditunjukkan oleh besaran IPM pada awal dan akhir periode tersebut. Indeks Pembangunan Manusia merupakan ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan dalam suatu wilayah, karena IPM dapat memperlihatkan kualitas penduduk suatu wilayah dalam hal harapan hidup, intelektual dan standar hidup layak pada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, IPM memiliki fungsi dalam memberikan tuntunan dan menentukan prioritas perumusan kebijakan dan penentuan program pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia juga memiliki manfaat dimana IPM dapat mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia, kemudian dapat menentukan peringkat pembangun dalam suatu wilayah/negara tersebut, dan IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga dapat digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Pada capaian pembangunan manusia di dalam suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Tujuan dalam kelompok ini yaitu untuk

mengorganisasikan suatu wilayah menjadi kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia. Berikut kelompok kriteria Indeks Pembangunan Manusia:

1. Kelompok “sangat tinggi”:  $IPM \geq 80$
2. Kelompok “tinggi”:  $70 \leq IPM < 80$
3. Kelompok “sedang”:  $60 \leq IPM < 70$
4. Kelompok “rendah”:  $IPM < 60$

## METODE PENELITIAN

Obyek penelitian yang akan diteliti yaitu *good governance* dan latar belakang profesi kepala daerah sebagai variabel bebas atau independen; kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan kinerja pemerintah daerah sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan karakteristik tertentu pada suatu fenomena yang menarik perhatian dari peneliti (Sekaran dan Bougie, 2013).

### *Populasi dan Sampel*

Populasi merupakan keseluruhan dari sekelompok orang, peristiwa atau hal yang akan diteliti oleh peneliti (Sekaran dan Bougie, 2013). Sedangkan menurut Sugiyono (2011), populasi merupakan keseluruhan wilayah generalisasi yang terdiri dari: objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti dan kemudian di tarik kesimpulannya. Penelitian ini mengambil populasi target seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah anggota populasi 18 Kabupaten dan 9 Kota. Menurut Sekaran (2011:104), sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dimana sampel dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah 6 (enam) Pemerintah Daerah Di wilayah Jawa Barat untuk tahun pelaporan tahun 2018. Enam pemerintah daerah tersebut adalah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon, dan Kabupaten Sumedang.

### **Variabel Dependen**

Variabel terikat pada penelitian ini yaitu:

1. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, diukur menggunakan opini audit.
2. Kinerja Pemerintah Daerah, diukur menggunakan indeks pembangunan manusia (IPM) yang memiliki beberapa indikator yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

### **Variabel Independen**

Variabel independen sering disebut variabel bebas dimana variabel yang dapat mempengaruhi atau suatu yang menjadi penyebab adanya perubahan pada variabel dependen. Variabel bebas pada penelitian ini yaitu:

1. *Good Governance*

*Good governance* yaitu penyelenggaraan manajemen dalam pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sepaham dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Pada penelitian ini *good governance* menekankan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan serta kinerja pemerintah daerah. *Good governance* diukur dengan beberapa indikator yaitu partisipasi, *fairness*, akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas

2. Latar belakang profesi Kepala Daerah

Latar belakang profesi kepala daerah dibagi dua, yaitu karier dan non karier. Berlatar belakang karir yaitu pegawai negeri sipil yang merintis karirnya di pemerintahan dan menjadi



kepala daerah. Sedangkan non karir dimaksud adalah kepala daerah yang berlatar belakang sebagai pengusaha atau memiliki profesi lainnya.

### Teknik pengumpulan data

Data dalam penelitian ini berupa data primer untuk variabel good governance, yang diperoleh melalui kuesioner. Responden dalam penelitian ini adalah kepala bagian penganggaran dan perbendaharaan pada badan keuangan dan aset daerah serta kepala bagian/divisi pada badan perencanaan pembangunan daerah. Sedangkan untuk variabel latar belakang profesi kepala daerah, kualitas laporan keuangan, dan kinerja pemerintah daerah menggunakan data sekunder berupa profil kepala daerah, opini audit BPK dan data IPM.

### Uji hipotesis

Hipotesis yang diajukan yaitu adanya pengaruh dari *Good Governance* dan Latar Belakang Profesi Kepala Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah. Hipotesis ini akan diuji menggunakan dua analisis regresi linier berganda dengan model sebagai berikut:

I) Untuk  $H_1$  :  $Y_1 = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$

II) Untuk  $H_2$  :  $Y_2 = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$

Dimana:

$Y_1$  = Opini Audit

$Y_2$  = Kinerja Pemerintah Daerah

$a$  = Konstanta

$b_i$  = Koefisien Regresi

$X_1$  = *Good Governance*

$X_2$  = Latar Belakang Profesi Kepala Daerah

$e$  = *Error Term*

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengujian Kualitas Alat Ukur Penelitian

Untuk menguji ketepatan dari instrumen penelitian yang digunakan, maka sebelum data diolah lebih lanjut terlebih dahulu harus dilakukan pengujian terhadap instrumen penelitian dengan tujuan untuk membuktikan apakah seluruh instrumen ini telah mampu mengukur secara tepat apa yang ingin diukur (valid) serta memiliki konsistensi yang baik (reliabel) untuk dapat digunakan sebagai alat ukur penelitian.

### Uji Validitas

Pengujian validitas dimaksudkan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu instrumen dalam kuesioner. Butir instrumen dikatakan valid jika pertanyaan dalam kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang hendak diukur oleh kuesioner tersebut serta memiliki koefisien validitas yang lebih besar dari 0,3. Hasil pengujian validitas menggunakan program SPSS 23.0 menghasilkan koefisien validitas dari seluruh butir pertanyaan untuk variabel *good governance* adalah lebih besar dari 0,3, yang berarti valid. Demikian juga untuk variabel latar belakang profesi kepala daerah, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan kinerja pemerintah daerah.

### Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dimaksudkan untuk menguji tingkat konsistensi dari alat ukur penelitian. Dalam penelitian ini untuk menguji konsistensi dari alat ukur penelitian digunakan metode *chronbach alpha*. Suatu konstruk atau variabel dapat diterima apabila memiliki koefisien reliabilitas yang jauh lebih besar dari 0,6. Hasil pengujian menghasilkan koefisien realibilitas *Cronbach;s Alpha* lebih besar dari 0,6 untuk seluruh variabel. Yang berarti seluruh alat ukur

memiliki tingkat konsistensi yang tinggi (*reliable*). Berdasarkan hasil pengujian validitas dan reliabilitas yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen yang digunakan dalam penelitian ini sudah teruji tingkat kesahihan (*validity*) dan konsistensinya (*reliability*) untuk dapat digunakan sebagai alat ukur penelitian.

#### Analisis Deskriptif

Berikut adalah hasil analisis deskriptif atas jawaban responden untuk variabel *good governance*.

**Tabel 1**  
**Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Berkaitan dengan Good Governance untuk 6 Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat**

No.	Dimensi	Jumlah Skor	Skor Ideal	Persentase Skor	Kriteria
1	Partisipasi	628	900	69,8%	Baik
2	Fairness	447	630	71,0%	Baik
3	Akuntabilitas	444	630	70,5%	Baik
4	Transparansi	638	900	70,9%	Baik
5	Efisiensi	621	900	69,0%	Baik
6	Efektivitas	357	540	66,1%	Cukup Baik
<b>Total</b>		<b>3135</b>	<b>4500</b>	<b>69,7%</b>	<b>Baik</b>

Sumber: Hasil olahan data kuesioner (2019)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah skor yang diberikan responden berkaitan dengan *good governance* adalah sebesar 3135 atau 69,7% dari jumlah skor idealnya 4500, dan termasuk dalam kategori “baik” dikarenakan ada pada rentang persentase antara 68%-84%.

Berikut adalah skor jawaban responden untuk variabel *good governance* pada masing-masing pemerintah daerah.

**Tabel 2**  
**Rangking Good Governance pada 6 Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat**

Rank	Pemerintah Daerah	Jumlah Skor	Persentase Skor	Kriteria
1	Kabupaten Indramayu	571	76,1%	Baik
2	Kabupaten Majalengka	567	75,6%	Baik
3	Kota Cirebon	564	75,2%	Baik
4	Kabupaten Kuningan	537	71,6%	Baik
5	Kabupaten Sumedang	465	62,0%	Cukup Baik
6	Kabupaten Cirebon	431	57,5%	Cukup Baik

Sumber: Hasil olahan data kuesioner (2019)

#### Latar Belakang Profesi Kepala Daerah

Dalam penelitian ini variabel latar belakang profesi kepala daerah diukur dengan menggunakan variabel *dummy* dimana poin 1 untuk latar belakang non karier dan poin 0 untuk latar belakang karier. Hasil pengujian ditampilkan dalam tabel berikut:

**Tabel 3**  
**Latar Belakang Profesi Kepala Daerah**

Latar Belakang Kepala Daerah	Jumlah	Persentase
Non Karier	3	50%
Karier	3	50%
Total	6	100%

Sumber: Hasil olahan data (2019)

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebanyak 50% dari kepala daerah memiliki latar non karier yaitu kepala daerah di Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon, sedangkan 50% lainnya memiliki latar karier yaitu kepala daerah di Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu dan kepala daerah di Kabupaten Sumedang.

### **Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Berikut disajikan gambaran mengenai opini audit pada 6 Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat.

**Tabel 4**  
**Opini Audit pada pada 6 Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat**

Opini Audit	Jumlah	Persentase
Wajar Tanpa Pengecualian	4	66,7%
Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas	2	33,3%
Total	6	100%

Sumber: Hasil olahan data (2019)

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebanyak 4 pemerintah daerah mendapatkan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian yaitu Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu dan Kota Cirebon, sedangkan 33,3% atau 2 sisanya mendapatkan opini auti Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas yaitu Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Sumedang.

### **Kinerja Pemerintah Daerah**

Berikut disajikan gambaran mengenai kinerja Pemerintah Daerah pada 6 Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat.

**Tabel 5**  
**Kinerja Pemerintah Daerah pada pada 6 Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat**

Kriteria	Jumlah	Persentase
Sangat Tinggi	0	0,0%
Tinggi	1	16,7%
Sedang	5	83%
Rendah	0	0%
Total	6	100%

Sumber: Hasil olahan data (2019)

Dari tabel di atas, diperoleh informasi bahwa sebanyak 5 pemerintah daerah atau 83% memiliki kinerja yang termasuk dalam kategori sedang yaitu Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Sumedang, sedangkan sisanya memiliki kinerja yang tergolong tinggi yaitu Kota Cirebon.

### Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Hipotesis yang diajukan yaitu adanya pengaruh dari *Good Governance* dan Latar Belakang Profesi Kepala Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah. Hipotesis ini akan diuji menggunakan dua analisis regresi linier berganda dengan model sebagai berikut:

$$\text{III) Untuk } H_1 : Y_1 = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$\text{IV) Untuk } H_2 : Y_2 = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana:

$Y_1$  = Opini Audit

$Y_2$  = Kinerja Pemerintah Daerah

$a$  = Konstanta

$b_i$  = Koefisien Regresi

$X_1$  = *Good Governance*

$X_2$  = Latar Belakang Profesi Kepala Daerah

$e$  = *Error Term*

Berikut adalah pengujian untuk hipotesis pertama dan kedua :

$H_1$  : Pengaruh *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

$H_2$  : Pengaruh latar belakang profesi kepala daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 6**  
**Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda (Model I)**

		Coefficients <sup>a</sup>					Correlations Zero-order
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
Model		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	0,308	0,703		0,438	0,691	
	$X_1$ (Good Governance)	0,008	0,001	0,964	6,265	0,008	0,963
	$X_2$ (Latar Belakang Kepala Daerah)	0,030	0,145	0,032	0,210	0,847	0,000

a. Dependent Variable:  $Y_1$  (Opini Audit)

Sumber: Hasil olah data dengan SPSS 21.0

Persamaan regresi yang menjelaskan pengaruh dari *good governance* dan latar belakang profesi kepala daerah terhadap kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

$$Y_1 = 0,308 + 0,008 X_1 + 0,030 X_2$$

Berdasarkan persamaan regresi di atas, dapat dijelaskan bahwa *good governance* dan latar belakang profesi kepala daerah memiliki koefisien regresi yang bernilai positif yang menunjukkan bahwa semakin baiknya *good governance* dan latar belakang profesi kepala daerah akan berdampak pada semakin baiknya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hal ini berarti bahwa semakin baiknya tata kelola yang dilakukan pemerintah daerah dan dengan didukung latar

belakang profesi kepala daerahnya akan membuat pengelolaan keuangan pemerintah daerah tersebut semakin baik sehingga kualitas laporan keuangan pun semakin baik.

### Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi merupakan nilai yang menjelaskan seberapa besar kemampuan semua variabel bebas yang dilibatkan kedalam model regresi dalam menjelaskan variasi dari variabel terikatnya. Hasil pengujian ditampilkan dalam tabel berikut:

**Tabel 7**  
**Koefisien Determinasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,964 <sup>a</sup>	0,929	0,882	0,17764

a. Predictors: (Constant), X<sub>2</sub> (Latar Belakang Kepala Daerah), X<sub>1</sub> (Good Governance)

b. Dependent Variable: Y<sub>1</sub> (Opini Audit)

Sumber: Hasil olah data dengan SPSS 23.0

Dari tabel di atas, diperoleh informasi bahwa nilai R<sup>2</sup> yang diperoleh adalah sebesar 0,929. Hasil tersebut menunjukkan jika *good governance* dan latar belakang profesi kepala daerah secara simultan memberikan kontribusi pengaruh sebesar 92,9% terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan sebanyak (1-R<sup>2</sup>) 7,1% sisanya merupakan besarnya kontribusi pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Untuk mengetahui kontribusi pengaruh secara parsial, dapat diketahui dari hasil perkalian antara nilai beta yang merupakan koefisien regresi terstandarkan (*standardized coefficients*) dengan *zero-order* (ryx) yang merupakan nilai korelasi parsial. Hasil perhitungan koefisien determinasi parsial disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 8**  
**Koefisien Determinasi**

	Standardized Coefficients	Correlations	Partial Coefficient of Determination
	Beta	Zero-order	
X <sub>1</sub> (Good Governance)	0,964	0,963	92,9%
X <sub>2</sub> (Latar Belakang Kepala Daerah)	0,032	0,000	0,00%
<b>Total Effect</b>			<b>92,9%</b>

Sumber: Hasil olah data dengan SPSS 23.0 dan Ms. Excel 2013

Tabel di atas diketahui bahwa *good governance* memberikan kontribusi pengaruh sebesar 92,9% terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan latar belakang profesi kepala daerah kontribusinya sebesar 0%, sehingga total kontribusi yang diberikan yaitu sebesar 92,9%. Hal ini berarti apapun latar belakang profesi kepala daerah tidak berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### Uji F (Simultan)

Uji statistika yang digunakan untuk menguji hipotesis simultan ini adalah uji F. Nilai  $F_{tabel}$  yang digunakan sebagai nilai kritis dalam uji simultan ini adalah sebesar 9,552 yang diperoleh dari lampiran tabel distribusi F dengan  $\alpha = 5\%$ ,  $df_1$  (k) 2 dan  $df_2$  (n - (k+1)) 3. Hasil pengujian ditampilkan dalam tabel berikut:

**Tabel 9**  
**Hasil Pengujian Hipotesis Simultan (Uji F)**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1,239	2	0,619	19,626	0,019 <sup>b</sup>
Residual	,095	3	0,032		
Total	1,333	5			

a. Dependent Variable:  $Y_1$  (Opini Audit)

b. Predictors: (Constant),  $X_2$  (Latar Belakang Kepala Daerah),  $X_1$  (Good Governance)

Sumber: Hasil olah data dengan SPSS 23.0

Dari tabel di atas, dapat dilihat nilai  $F_{hitung}$  yang diperoleh adalah sebesar 19,626 dan nilai tersebut jauh lebih besar dari nilai  $F_{tabel}$  9,552 maka dengan taraf kepercayaan sebesar 95% dapat diputuskan untuk menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$  yang berarti *good governance* dan latar belakang profesi kepala daerah secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### Uji t (Parsial)

Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis konseptual dalam penelitian ini adalah uji t, dimana nilai  $t_{tabel}$  yang digunakan sebagai nilai kritis dalam penelitian ini adalah sebesar 3,182 yang diperoleh dari tabel distribusi t dengan  $\alpha = 5\%$  dan nilai  $df$  (n-(k+1)) = 3 untuk uji dua pihak (*two tailed*). Hasil pengujian dapat dilihat pada table-tabel tabel berikut:

**Tabel 10**  
**Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t) Pengaruh Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Model	$t_{hitung}$	$t_{tabel}$	Sig. t	A	Keputusan	Kesimpulan
$X_1 \rightarrow Y_1$	6,265	3,182	0,008	0,05	Ho ditolak	Signifikan

Sumber: Hasil olah data dengan SPSS 23.0

Dari tabel di atas, dapat dilihat nilai  $t_{hitung}$  yang diperoleh adalah sebesar 6,265 dan nilai tersebut lebih besar daripada nilai  $t_{tabel}$  3,182 maka dengan taraf kepercayaan sebesar 95% dapat diputuskan untuk menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$  yang berarti *good governance* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yang artinya semakin baiknya tata kelola yang dihasilkan dalam suatu daerah tersebut maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan baik dimana semakin baiknya *good governance* akan berdampak pada semakin baiknya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Dalam uji ini variabel  $X_1$  *good governance* diukur dengan enam indikator yang terdiri dari partisipasi, *fairness*, akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Saraswati dan Budiasih (20129). yang menyatakan bahwa *good governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

**Tabel 11**  
**Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t) Pengaruh Latar Belakang Profesi Kepala Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Model	t <sub>hitung</sub>	t <sub>tabel</sub>	Sig. t	A	Keputusan	Kesimpulan
X <sub>2</sub> → Y <sub>1</sub>	0,210	3,182	0,847	0,05	Ho diterima	Tidak Signifikan

Sumber: Hasil olah data dengan SPSS 23.0

Dari tabel di atas, dapat dilihat nilai t<sub>hitung</sub> yang diperoleh adalah sebesar 0,210 dan nilai tersebut lebih kecil daripada nilai t<sub>tabel</sub> 3,182 maka dengan taraf kepercayaan sebesar 95% dapat diputuskan untuk menerima Ho dan menolak Ha yang berarti latar belakang profesi kepala daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Latar belakang profesi kepala daerah dalam penelitian ini dibagi ke dalam karier dan non-karier.

Berikut adalah hasil pengujian untuk hipotesis ketiga dan keempat yaitu :

H<sub>3</sub> : Pengaruh *good governance* terhadap kinerja pemerintah daerah

H<sub>4</sub> : Pengaruh latar belakang profesi kepala daerah terhadap kinerja pemerintah daerah

**Tabel 12**  
**Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda (Model II)**

		Coefficients <sup>a</sup>					Correlations
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Zero-order
Model		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	0,732	1,713		0,427	0,698	
	X <sub>1</sub> (Good Governance)	0,002	0,003	0,355	0,748	0,509	0,339
	X <sub>2</sub> (Latar Belakang Kepala Daerah)	0,342	0,354	0,459	0,968	0,405	0,447

a. Dependent Variable: Y<sub>2</sub> (Kinerja Pemerintah Daerah)

Sumber: Hasil olah data dengan SPSS 21.0

Persamaan regresi yang menjelaskan pengaruh dari *good governance* dan latar belakang profesi kepala daerah terhadap kinerja pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

$$Y_2 = 0,732 + 0,002 X_1 + 0,342 X_2$$

Dari persamaan regresi tersebut, dapat dilihat bahwa *good governance* dan latar belakang profesi kepala daerah memiliki koefisien regresi yang bernilai positif. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Saraswati dan Budiasih (2019) dan Hambrick dan Manson (1984).

**Tabel 13**  
**Koefisien Determinasi Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,571 <sup>a</sup>	0,326	-0,124	0,43278

a. Predictors: (Constant), X<sub>2</sub> (Latar Belakang Kepala Daerah), X<sub>1</sub> (Good Governance)

b. Dependent Variable: Y<sub>2</sub> (Kinerja Pemerintah Daerah)

Sumber: Hasil olah data dengan SPSS 23.0

Dari tabel di atas, nilai  $R^2$  untuk model II ini adalah sebesar 0,326, dimana kontribusi sisanya yaitu 67,4% diberikan oleh factor lain yang tidak diteliti. Sedangkan untuk kontribusi parsial dari masing-masing variabel, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 14**  
**Koefisien Determinasi**

	Standardized Coefficients	Correlations	Partial Coefficient of Determination
	Beta	Zero-order	
X <sub>1</sub> (Good Governance)	0,355	0,339	12,1%
X <sub>2</sub> (Latar Belakang Kepala Daerah)	0,459	0,447	20,5%
<b>Total Effect</b>			<b>32,6%</b>

Sumber: Hasil olah data dengan SPSS 23.0 dan Ms. Excel 2013

Tabel di atas memberikan informasi mengenai besar kontribusi pengaruh secara parsial. Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa *good governance* memberikan kontribusi pengaruh sebesar 12% terhadap kinerja pemerintah daerah, sedangkan latar belakang profesi kepala daerah kontribusinya sebesar 20,5%, sehingga total kontribusi yang diberikan yaitu sebesar 32,6%. Latar belakang profesi kepala daerah memberikan kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan *good governance*. terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman yang dimiliki seorang pemimpin berperan dalam mengarahkan pemimpin tersebut dalam mengelola organisasi dan membawa organisasi mencapai tujuannya. Ini sejalan dengan *Upper Echelon Theory* (Hambrick and Mason, 1984, Manner, 2010).

#### Uji F (Simultan)

Uji statistika yang digunakan untuk menguji hipotesis simultan ini adalah uji F. Nilai  $F_{tabel}$  yang digunakan sebagai nilai kritis dalam uji simultan ini adalah sebesar 9,552 yang diperoleh dari lampiran tabel distribusi F dengan  $\alpha = 5\%$ ,  $df_1$  (k) 2 dan  $df_2$  (n - (k+1)) 3. Hasil pengujian ditampilkan dalam tabel berikut:

**Tabel 15**  
**Hasil Pengujian Hipotesis Simultan (Uji F)**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0,271	2	0,136	0,725	0,554 <sup>b</sup>
	Residual	0,562	3	0,187		
	Total	0,833	5			

a. Dependent Variable: Y<sub>2</sub> (Kinerja Pemerintah Daerah)

b. Predictors: (Constant), X<sub>2</sub> (Latar Belakang Kepala Daerah), X<sub>1</sub> (Good Governance)

Sumber: Hasil olah data dengan SPSS 23.0

Dari tabel di atas, dapat dilihat nilai  $F_{hitung}$  yang diperoleh adalah sebesar 0,725 dan nilai tersebut jauh lebih kecil dari nilai  $F_{tabel}$  9,552 maka dengan taraf kepercayaan sebesar 95% dapat diputuskan untuk menolak  $H_a$  dan menerima  $H_o$  yang berarti *good governance* dan latar belakang profesi kepala daerah secara simultan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil ini berlawanan dengan penelitian Hambrick dan Manson (1984).



### Uji t (Parsial)

Berikut adalah hasil pengujian pengaruh *good governance* dan latar belakang profesi kepala daerah terhadap kinerja pemerintah daerah, secara parsial.

**Tabel 16**  
**Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t) Pengaruh Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**

Model	$t_{hitung}$	$t_{tabel}$	Sig. t	A	Keputusan	Kesimpulan
$X_1 \rightarrow Y_2$	0,748	3,182	0,509	0,05	Ho diterima	Tidak Signifikan

Sumber: Hasil olah data dengan SPSS 23.0

Dari tabel di atas, dapat dilihat nilai  $t_{hitung}$  sebesar 0,748 dan nilai tersebut lebih kecil daripada nilai  $t_{tabel}$  3,182 maka dengan taraf kepercayaan sebesar 95% dapat diputuskan untuk dan menerima  $H_0$  dan menolak  $H_a$  yang berarti *good governance* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Hal ini bisa terjadi dikarenakan kurangnya atau lemahnya dari salah satu aspek pada *good governance*, antara lain kurangnya saluran pengaduan masyarakat dan unit pelayanan pengaduan masyarakat.. Hal ini mengakibatkan kurangnya pemahaman pemerintah atas masalah yang terjadi di daerahnya karena masyarakat kurang bisa menyampaikan keluhan secara langsung.

**Tabel 17**  
**Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t) Pengaruh Latar Belakang Profesi Kepala Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**

Model	$t_{hitung}$	$t_{tabel}$	Sig. t	A	Keputusan	Kesimpulan
$X_2 \rightarrow Y_2$	0,968	3,182	0,405	0,05	Ho diterima	Tidak Signifikan

Sumber: Hasil olah data dengan SPSS 23.0

Dari tabel 4.25 di atas, dapat dilihat nilai  $t_{hitung}$  yang diperoleh adalah sebesar 0,968 dan nilai tersebut lebih kecil daripada nilai  $t_{tabel}$  3,182 maka dengan taraf kepercayaan sebesar 95% dapat diputuskan untuk menerima  $H_0$  dan menolak  $H_a$  yang berarti latar belakang profesi kepala daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Capaian kinerja pemerintah daerah tidak terlalu berbeda antara pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala daerah yang berlatar belakang profesi karir atau pun non karir. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Avellaneda (2012) dimana tidak menemukan dampak yang signifikan.

### SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas, dapat disimpulkan (1) *Good governance* dan latar belakang profesi kepala daerah secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah dengan kontribusi pengaruh sebesar 92,9%. Sedangkan hasil pengujian secara parsial, hanya *good governance* yang berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Azlim (2012) yang menyatakan bahwa *good governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Juga sejalan dengan penelitian Setyaningrum & Syafitri (2012) bahwa latar belakang kepala daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan; (2) *Good governance* dan latar belakang profesi kepala daerah baik secara simultan maupun parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Pratiwi & Aryani (2016) yang menyatakan bahwa karakteristik kepala daerah tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, I, Desmiyawati, Nurazlina. (2014). Pengaruh Good Governance, Pengendalian Intern, Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, *Jurnal Online Mahasiswa*, Vol 1.
- Avellaneda, Claudia, (2012), Municipal Revenue Strategy in a Latin American Setting : Does The Public Manger's Background Matter?, *Public Management Review* 14, No 8, pp 1061 - 1068
- Badan Pusat Statistik. (N.D.). Retrieved From Indeks Pembangunan Manusia: <https://ipm.bps.go.id/>
- Bank, W. (N.D.). *The World Bank*. Retrieved From <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia>
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Ebrahim, A. (2006). Placing The Normative Logics Of Accountability In Thick Perspective.
- Elvira Zeyn, (2011), Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan *Trikonomika* Volume 10, No. 1, pp 52–62
- Hambrick, D. C., & Mason, P. A. (1984). Upper echelons: The organization as a reflection of its top managers. *The Academy of Management Review*, 9(2), 193–206
- Kemitraan. (N.D.). *Kemitraan Partnership*. Retrieved From <http://www.kemitraan.or.id/>
- Kesuma, Desmaria Puji, Anwar, Choirul, dan Darmansyah (2017), Pengaruh Good Governance, Penerapan Standar Akuntansi Pemerinthn, Sistem Pengendalian, Internal Pemerintah Dan Kompetensi Aparatur Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pada Satuan Kerja Kementerian Pariwisata, *Jurnal Ilmiah Widya Ekonomika*, Vol 1, No 2, Desember
- Manner, Mikko H, (2010), The Impact of CEO Characteristics on Corporate Social Performance, [\*Journal of Business Ethics\*](#), Vol 93, pp 53–72
- Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mirza, D. S. (2012). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. *Economics Development Analysis Journal*.
- Mohammad Bhakti Setiawan, A. H. (2013). Indeks Pembangunan Manusia.
- Mursidah1 dan Khairina, (2018), Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, Vol 6, No 1, Februari..
- Saraswati, Gita, I Gustu Ayu dan Budiasih, Nyoman, Igusti Ayu, (2019), Pengaruh Good Governance, Kompetensi SDM dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan, *E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol 27.3, Juni, pp 2267 - 2292
- Sekaran, U. (2006). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Uar, Aty, (2016), Pengaruh Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Pada Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Ambon, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol 6, No. 1
- Widjajanti, Kesi, dan Sugiyanto, Eviatiwi Kusumaningtyas, (2015), Gaya Kepemimpinan Dan Good Governanve Sebagai Upaya Peningkatan Exellent Service Dan Kepercayaan Masyarakat, *Dinamika Sosbud*, Vol 17, No 2, Desember
- Yenny. (2013). Prinsip-Prinsip Good Governance.